



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	38
2.4. Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	63
4.2. Program dan Kegiatan	64
BAB V PENUTUP	81



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

DAFTAR TABEL	
2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)	13
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Program dan Kegiatan	33
2.3. Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Internal	40
2.4. Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Eksternal	41
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	45
3.1. Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	61
4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya antara lain :

- 1) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang geologi dan dan air tanah;



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

- 4) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan mineral;
- 5) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;
- 6) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang energi;
- 7) Pembinaan terhadap cabang dinas / unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Rencana Kerja (RENJA) PD yang merupakan dokumen perencanaan OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan mempunyai fungsi untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA PD. Tahapan penyusunan RENJA telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang mana telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA).



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

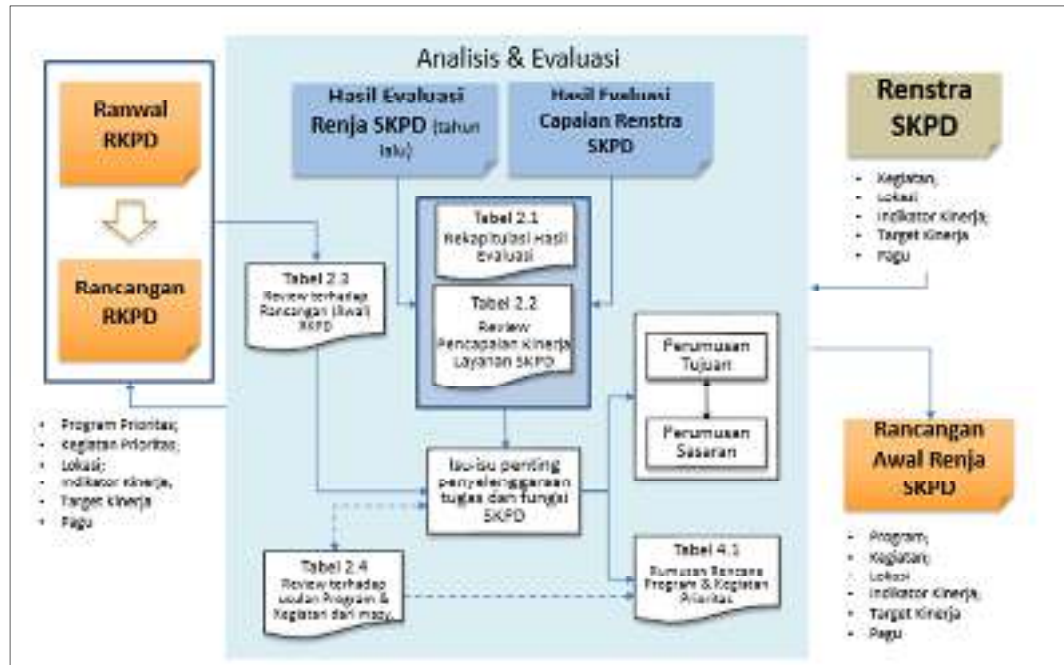
Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580).
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

dan Fungsi Perangkat Daerah; Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD;
dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah, berisi tentang Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renja dan upaya strategis
pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan Pandemi Covid-19 dan refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengelola anggaran belanja langsung setelah refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 11.508.207.996,39 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.298.613.171,65 atau sebesar 98,18%, dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Dengan adanya permasalahan Pandemi Covid-19 dan refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya, sehingga terdapat beberapa kinerja yang tidak sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas darat operasional
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 2) Dukungan Operasional ASN KESDM yang ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau

e. Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan

- 1) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyusunan dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau

f. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah
- 2) Identifikasi Cekungan Air Tanah
- 3) Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Mineral

g. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

- 1) Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
- 3) Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- 4) Pendataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
- 5) Pengelolaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat
- 6) Pengelolaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral
- 7) Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri

h. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

- 1) Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin
- 2) Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyediaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pengadaan dan Pemasangan PJU di Provinsi Kepri



i. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

- 1) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Sekala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi
- 3) Pemeliharaan Aset Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pengawasan, Pembinaan, Inventarisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi.
- 5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pelaksanaan urusan pilihan energi dan sumber daya mineral, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.1 terlampir**:



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Kepmen 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/9)	12	13=(8+10+12)	14=(13/7*100)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran									
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu									
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu									
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Pengelola Keuangan yang Profesional			Bulan	12	12	0	0	0	0	12	100



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan yang Prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
			Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Kebutuhan Penunjang Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14					14	14	100
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Bulan	12					12	12	100
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	48					48	48	100
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12					12	12	100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Bulan	12					12	12	100
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12					12	12	100
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	240					240	240	100
					Pengadaan Meubel	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	Bulan	12					12	12	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12					12	12	100
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara									
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dapat Beroperasi Dengan Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dapat Berfungsi Dengan Baik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12					12	12	100
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12					12	12	100
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Petugas dan Penunjang Disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya									
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi									
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas									
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	Orang	440	190	95	95	100	95	285	64,77
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun									



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan											
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	Jumlah Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	1	1	0	0	0	1	100	
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Dok	5	3	1	0	0	1	4	80
									4	2	1	0	0	1	3	75
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Dok	1					1	1	100
				Revisi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	1	1	0	0	0	0	1	100
				Program Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										
				Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Informasi ESDM yang Update			Bulan	60	24	0	0	0	0	24	40
				Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun									
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas									
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Data Renja Program Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	5	3	1	1	100	1	5	100
				Rapat Koordinasi Teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral se-Provinsi Kepri	Data Usulan Program Kegiatan Kab/Kota se-Provinsi Kepri			Dok	4	0	0	0	0	0	0	100
				Dukungan Operasional ASN KESDM yang ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Usaha Pertambangan			IUP	112	42	28	17	60,71	28	87	77,68



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Festival Bahari Kepri 2017	Terlaksananya Festival Bahari Kepri 2017			Keg	1	1	0	0	0	0	1	100
			Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian										
				Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan		Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan	%	100	33,33	75	43,33	57,77	100	100	100,00
				Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	7	6	1	1	100,00	0	7	100,00
					Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan									
					Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi									
			Pembina dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Perusahaan Pengusahaan Air Tanah yang Taat Aturan			Perusahaan	30	10	8	3	37,5	0	13	43,33
			Penyusunan Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah di Prov. Kepri	Dokumen Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah	Dok	3	1	0	0	0	1	2	66,66
			Penyusunan Zona Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah	Dokumen Zona Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah			Kab/Kota	8	2	0	0	0	0	2	25
			Identifikasi Cekungan Air Tanah	Dokumen Kajian Cekungan Air Tanah	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen Penetapan Cekungan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau	Dok	3	1	1	1	100	1	3	100
			Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Dokumen Informasi Potensi Sumber Daya Mineral	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengembangan Database Spasial Data Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dok	5	2	0	0	0	1	3	60



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha Pemanfaatan Air Tanah yang Taat Aturan			%	100	20	0	0	0	0	95	95,00	
			Inventarisasi Potensi Air Tanah Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Potensi Air Tanah			Dok	4	1	0	0	0	0	1	25	
			Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		Pengelolaan Mineral dan Batubara											
				Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan		Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP										
					Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan										
			Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Mineral	Data Potensi Sumber Daya Mineral	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab/Kota	4	1	1	1	100	1	3	75	
			Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara		Pengelolaan Mineral dan Batubara											
				Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP		Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP		%	95	90	85	88,33	103,92	95	95	100,00
				Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku		Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku		%	95	90	85	40	47,06	0	40	42,10



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

					Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah		Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	1,50	1,35	1,5	1,25	83,33	1,50	1,50	100
				Monitoring Pelaksanaan Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan Pendapatan Daerah			Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0
				Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum	Persentase Kontribusi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Mineral			%	1,50	1,35	1,5	1,25	83,33	0	1,25	83,33
				Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku			%	95	90	85	40	47,06	0	40	42,10
				Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Persentase Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sektor Pertambangan Mineral			%	95	90	85	88,33	103,92	0	88,33	92,97
				Pendataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)	Data Pertambangan Tanpa Izin			Kab/ Kota	7	3	7	1	14,28	0	4	57,14
				Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral	Blueprint pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sektor pertambangan mineral			Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0
				Pengelolaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat	Pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat yang Baik dan Benar			Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100
				Pengelolaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral	Terlaksananya kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP, serta terlaksananya penilaian reklamasi dan pasca tambang IUP oleh Pemerintah Provinsi Kepri			IUP	8	0	8	8	100	0	8	100
				Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri	Harga patokan mineral bukan logam dan batubara			Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Penyusunan Dokumen Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan oleh Pemegang IUP		Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Peningkatan Pemahaman Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral		Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0	
			Bimbingan Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan	Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya K3 dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan bagi Pelaku Kegiatan Usaha Pertambangan		Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0	
			Bimbingan Teknis Sistem Pembayaran E-PNBP	Pembayaran PNPB secara Online Melalui Aplikasi SIMPONI		Dokumen	7	0	0	0	0	0	0	0	
			Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi		Program Pengelolaan Energi Terbarukan										
				Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,001	0,0008	0,0009	0,00134	148,88	0,001	0,00134	134,00
					Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Cakupan pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi									
			Dukungan Pengadaan dan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kegiatan DAK PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau		Keg	5	2	0	0	0	0	0	2	40
			Inventarisasi Pemanfaatan Energi	Data Kebutuhan Pemanfaatan Energi Provinsi Kepulauan Riau		Kab/ Kota	7	7	0	0	0	0	0	7	100
					Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya data, peraturan dan kebijakan daerah terkait Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	1	1	0	0	0	0	1	100
			Bimbingan Konservasi Energi	Jumlah Pengguna Energi yang Tersosialisasi		Orang	80	40	0	0	0	0	0	40	50



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau (DAK)	Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau			Unit	10	10	0	0	0	0	10	100
			Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang terpasang	Unit	110	20	0	0	0	9	29	26,36
			Pengadaan dan Pembangunan Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Terbangunnya Energi Skala Kecil di Provinsi Kepri			Kab/ Kota	18	0	0	0	0	0	0	0
			Dukungan DAK Bidang Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan DAK Bidang Energi			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
			Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi	Meningkatnya Pemahaman tentang Konservasi Energi			Kab/ Kota	6	3	1	1	100	0	4	66,66
			Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau			Lap	3	2	1	1	100	3	3	100
			Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepri	Data Kebutuhan Energi di Provinsi Kepulauan Riau			Dok	2	1	0	0	0	0	1	50
			Peningkatan Efisiensi Pemakaian dan Pengolahan Energi	Audit Energi pada Gedung Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau			Jmlh Gedung	6	0	0	0	0	0	0	0
					Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	1					1	1	100
			Monitoring dan Inventarisasi Data Potensi Pembangkit Aneka Energi Baru	Database Potensi EBT			Kab/ Kota	3	0	0	0	0	0	0	0
			FS dan DED Potensi Energi Baru Terbarukan	Tersedianya FS dan DED Potensi EBT	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Tersedianya FS/DED Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur EBT di Provinsi	Dok	30	0	0	0	0	1	1	3,33



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Pemeliharaan Aset Energi Baru Terbaru	Data Pemeliharaan Aset EBT			Dok	3	1	1	1	100	1	3	100
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpeliharanya Aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	Unit	2					2	2	100
			Pengawasan, Pembinaan, Inventarisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi	Data Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi			Kab/ Kota	7	7	7	7	100	0	7	100
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau			Dokumen	1	0	1	0	0	1	1	100
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan										
				Rasio Elektrifikasi		Rasio Elektrifikasi	%	93,50	92,59	92,50	93,72	101,32	94,50	94,50	101,07
				Rasio Desa Berlistrik		Rasio Desa Berlistrik	%	100	89,90	97,85	91,35	93,36	100	100	100,00
					Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										
			Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	Unit	135	60	20	4	20	4	68	50,37
			Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Tahun	4	2	0	0	0	1	3	75
			Pembangunan Listrik Pedesaan Di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Energi Listrik di Desa yang Belum Belistri di Provinsi Kepulauan Riau			Keg	3	1	0	0	0	0	1	25



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

				Penyediaan Pembangkit Listrik Genset di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyediaan Ketenagalistrikan bagi Desa yang Belum Belistri di Provinsi Kepulauan Riau			Keg	1	1	1	1	100	1	1	100
				Pengadaan Gardu Distribusi di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Gardu Distribusi di Kabupaten/Kota			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin	Terlaksananya Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Keg	3	1	1	1	100	1	3	100
				Penyediaan Pembangkit Listrik & Rumah Mesin Pembangkit	Tersedianya Pembangkit Listrik			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Bumi Perkemahan Kab. Bintan Kec. Teluk Bintan)	Tersedianya Jaringan Distribusi Tenaga Listrik			Keg	1	0	0	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan PJU di Pulau Dompok	Terpeliharanya PJU di Pulau Dompok			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedia Genset di Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	Unit	4	1	1	1	100	1	3	75
				Pengadaan dan Pemasangan PJU di Provinsi Kepri	Tersedianya Penerangan Jalan Umum di Provinsi Kepri			Keg	4	2	1	1	100	1	4	100
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Provinsi Kepulauan Riau	Unit	175					175	175	100
				Studi Kelayakan Pembangunan Interkoneksi Jaringan Listrik Kabel Laut untuk Kebutuhan Masyarakat Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya DED Kelayakan Pembangunan Interkoneksi Kabel Laut di Pulau-Pulau Kecil			Pulau	1	0	0	0	0	0	0	0



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan											
				Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	70,79	82	82,11	100,13	100	100	100,00
					Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan									
					Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan									
					Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi									
					Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi									
			Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Ketenagalistrikan	Dokumen PERDA Ketenagalistrikan			Izin	1	1	0	0	0	0	1	100
			Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang sesuai dengan aturan			%	150	155	43	43	100	0	198	132



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rekomendasi	1					1	1	100
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomendasi	40					40	40	100
				Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang taat aturan		%	100							
				Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang taat aturan		Pelaku Usaha	100							
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	1					1	1	100
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Laporan	1					1	1	100
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Laporan	1					1	1	100



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

			Peningkatan Keselamatan Teknis dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Provinsi Kepri	Jumlah pelaku usaha yang sudah memenuhi unsur keselamatan instalasi listrik			Dok	175							
			Penyusunan dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya data Rasio Elektrifikasi dan Data Pemakaian Listrik per Kapita di Provinsi Kepulauan Riau			Pelaku Usaha	3							
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengusahaan Ketenagalistrikan	Jumlah Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang terkoordinasi			Dok	150							
			Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)	Dokumen RUKD			Izin	1							



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pilihan										
	Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral										
	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai Aturan	%	100	33,33	75	43,33	57,77	100	100	100,00
		Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	7	6	1	1	100,00	0	7	100,00
	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	95	90	85	88,33	103,92	95	95	100,00
		Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	95	90	85	40	47,06	0	40	42,10



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	1,50	1,35	1,50	1,25	83,33	0	1,25	83,33
	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,001	0,0008	0,0009	0,00134	148,88	0,001	0,00134	134,00
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	%	93,50	92,59	92,50	93,72	101,32	94,50	94,50	101,07
		Rasio Desa Berlistrik (%)	%	100	89,90	97,85	91,35	93,36	100	100	100,00
	Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	70,79	82	82,11	100,13	100	100	100,00



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersebut pada table 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Dari 9 indikator jika dilihat pencapaian sampai dengan tahun 2020 terdapat 4 indikator yang realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni:
 - Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai Aturan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 43,33% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 75% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 57,77%.
 - Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 40% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 95% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 42,10%.
 - Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,25% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 1,50% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 83,33%.
 - Rasio Desa Berlistrik realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 91,35% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 97,85% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 93,36%.



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

2. Terdapat 1 indikator yang realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni: Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 1 Kab/Kota dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 1 Kab/Kota sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 100%.
3. Dari 9 indikator jika dilihat pencapaian sampai dengan tahun 2020 terdapat 4 indikator yang realisasi indikator kinerja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni:
 - Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,33% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 85% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 103,92%.
 - Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,00134% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 0,0009% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 148,88%.
 - Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,00134% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 0,0009% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 148,88%.
 - Rasio Elektrifikasi (%) realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 93,72% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 92,50% sehingga



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 101,32%.

- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 82,11% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 82% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 100,13%.

Dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik. Keterbatasan anggaran dan dinamika perubahan kebijakan dan isu yang terjadi mengakibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dan mengalami perubahan - perubahan. Dari tabel juga dapat kita lihat bahwa program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan, dikarenakan adanya beberapa kendala atau permasalahan pada tahun 2020 yaitu permasalahan Pandemi Covid-19 dan adanya refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, adapun jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dapat dilihat pada **tabel 2.3** berikut :



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

NO	Indikator	Satuan	Realisasi			Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi	Proyeksi
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai Aturan	%	20	23	33,33	20	35	50	75	100	43,33	100
2	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	%	-	3	3	-	3	4	-	-	1	-
3	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	70	100	90	70	75	80	85	95	88,33	95
4	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	70	85,71	90	70	75	80	85	95	40,00	-
5	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	1,91	1,28	1,35	1,00	1,20	1,40	1,50	1,50	1,25	-



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

NO	Indikator	Satuan	Realisasi			Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi	Proyeksi
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
6	Rasio Elektrifikasi (%)	%	91,44	91,50	92,59	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,72	94,50
7	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (%)	%	78,61	85,1	89,9	81,50	88,50	95,45	97,85	100	91,35	100
8	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	21,58	32,10	70,79	20	45	64	82	100	82,11	100
9	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0006	0,0007	0,0007	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001	0,00134	0,00134



Dari Tabel diatas dapat kita lihat keterangan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap Persentase Pelaku Usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan merupakan perbandingan Jumlah Pelaku Usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan dengan jumlah pelaku usaha pemanfaatan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau, evaluasi pelaku usaha yang memanfaatkan sesuai aturan jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin pemanfaatan air tanah dan telah diterbitkan rekomendasinya berjumlah 10 pelaku usaha. Namun, dengan adanya perubahan kewenangan dari pemerintah pusat di mana dalam aturan Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 di mana di Pasal 77 disebutkan, kewenangan Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi sudah tidak berlaku. Akan tetapi para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai aturan tetap menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena di mana di dalam Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 sebagian Pengelolaan Air Tanah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga pada tahun 2020 indikator persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan diukur berdasarkan pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai dengan aturan ada sebanyak 3 pelaku usaha yang ada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Sampai dengan tahun 2020 jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin pemanfaatan air tanah dan telah diterbitkan rekomendasinya serta dilakukan pembinaan dan pengawasan atas para pelaku usaha yang



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

memanfaatkan air tanah yang sesuai dengan aturan berjumlah 13 pelaku usaha dengan pesentase 43,33%.

2. Evaluasi terhadap Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah dengan target 1 Kab/Kota dan terealisasi 1 Kab/Kota di tahun 2020. Dari target 7 Kab/Kota telah tercapai dengan rincian sebagai berikut: di tahun 2018 tercapai 3 Kab/Kota, di tahun 2019 tercapai 3 Kab/Kota dan di tahun 2020 tercapai 1 Kab/Kota.
3. Evaluasi persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai SOP dapat digambarkan dengan jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan izin usaha pertambangan. Adapun pada tahun 2020 ditarget 85% dan terealisasi capaian sebesar 88,33% sehingga capaian kinerja sebesar 103,92%.
4. Hasil evaluasi persentase Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat digambarkan dengan jumlah pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah pemegang IUP yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pada tahun 2020 dengan target sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 40,00% sehingga capaian kinerja sebesar 47,06%. Dikarenakan keterbatasan tersedianya anggaran merupakan faktor utama penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja, dimana pada Tahun Anggaran 2020 terjadi refocusing anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Kepulauan.



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

5. Evaluasi terhadap persentase Kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dapat digambarkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam Provinsi Kepulauan Riau dibanding dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020, dari hasil evaluasi persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dengan target 1,50% dapat terealisasi capaian sebesar 1,25%.
6. Evaluasi terhadap persentase Rasio Elektrifikasi tahun 2020 dapat digambarkan Jumlah Rumah Tangga yang memakai tenaga listrik (PLN maupun Non PLN) dibanding dengan Jumlah Total Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 92,50% sehingga dapat terealisasi capaian sebesar 93,72%.
7. Evaluasi terhadap Rasio desa/kelurahan berlistrik tahun 2020 dapat digambarkan Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 97,85% sehingga dapat terealisasi capaian sebesar 91,35%.
8. Hasil evaluasi terhadap persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan dengan target sebesar 82,00% dapat terealisasi sebesar 82,11% sehingga capaian kinerja sebesar 100,13%.
9. Evaluasi terhadap persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan target sebesar 0,0009% dapat terealisasi sebesar 0,00134% sehingga capaian kinerja sebesar 148,89%.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

- 1) Masih diperlukan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral dengan peningkatan saran dan prasarana penunjang, pengikutsertaan pendidikan dan pelatihan, penegakkan disiplin, pengefektifan perencanaan serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya mineral dan energi yang cukup besar dan beragam tetapi belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Data dan informasi geologi belum diterapkan secara optimal untuk pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah;
- 4) Kondisi geografis yang bersifat kepulauan menyulitkan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi pada masyarakat;
- 5) Penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat didaerah sulit air belum maksimal dilakukan;
- 6) Belum adanya penetapan cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau;
- 7) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral;
- 8) Belum semua pemegang IUP menerapkan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*);
- 10) Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di kabupaten/kota;
- 11) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian;



- 12) Masih Rendahnya Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik;
- 13) Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak;
- 14) Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas;
- 15) Kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Daerah masih rendah.

Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut baik internal maupun eksternal, harus dipandang sebagai suatu tantangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

- 1) Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan teknik pertambangan yang benar dan berwawasan lingkungan;
- 2) Kurangnya tenaga pengawas teknis di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan yang ada di provinsi terlebih di Kabupaten/Kota;
- 3) Masih dominannya pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkit Tenaga Listrik;
- 4) Masih banyak penduduk di daerah terpencil belum menikmati listrik, sehingga rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan relatif masih rendah.
- 5) Lokasi potensi sumber daya alam pada umumnya terletak di daerah-daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menjangkau lokasi tersebut;



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

- 6) Tumpang tindih sektor pertambangan dengan kepentingan sektor lain, kelautan, perhutanan, pertanian, pariwisata dan lain-lain;
- 7) Isu lingkungan yang semakin deras digulirkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun *non government organization*.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan.

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan mempergunakan analisa *SWOT*, yaitu dengan menganalisa kondisi internal maupun eksternal Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta faktor yang menjadi peluang dan ancaman yang akan dan terus dihadapi oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), sedangkan analisis eksternal mencakup faktor Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan/Ancaman (*Threats*) pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.3
Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Internal

No	Faktor Internal	S	W
1	Kelembagaan dan Kewenangan	✓	
2	Jumlah SDM		✓
3	Kompetensi SDM	✓	
4	Sarana dan Prasarana		✓
5	Reputasi PD	✓	
6	Pengalaman Kerja	✓	



Tabel 2.4

Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Eksternal

No	Faktor Internal	O	T
1	Potensi Sumber Daya Alam	✓	
2	Kerjasama / Kemitraan	✓	
3	Kebijakan Nasional		✓
4	Perkembangan Teknologi		✓
5	Partisipasi Masyarakat	✓	
6	Mekanisme Pasar		✓
7	Infrastruktur Energi		✓
8	Isu Lingkungan		✓
9	Kondisi Geografis		✓

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu-isu strategis Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar, namun pemanfaatannya masih belum optimal;
- 2) Rasio elektrifikasi dan efisiensi penggunaan listrik di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal, sementara potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan;
- 3) Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- 4) Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dan masih terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain;
- 5) Belum optimalnya informasi hidrogeologi dan sumberdaya air tanah dalam rangka menunjang investasi dan konservasi air tanah, juga belum optimalnya pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air;
- 6) Belum optimalnya informasi geologi dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumber daya geologi dan pengembangan wilayah;



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

- 7) Belum optimalnya informasi terhadap mitigasi bencana geologi dan lingkungan geologi;
- 8) Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.

Selain dari pada Isu yang berada pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, terdapat juga yang menjadi Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) yang harus menjadi perhatian daerah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- 1) Target/ Indikator Nasional terhadap Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik darui PLN dan bukan PLN menjadi Indikator daerah yang harus dilaksanakan, indikator ini belum sama sekali mendapatkan data. Untuk tahun 2020 direncanakan data yang menjadi target indikator ini dapat terealisasi, terkait sumber data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat berkoordinasi dengan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.
- 2) Target/ Indikator Nasional terhadap Pengendalian dan Penegakan Hukum bagi penggunaan air tanah juga menjadi salah satu Indikator Daerah yang sudah tercapai;
- 3) Target/ Indikator Nasional terhadap Rasio Elektrifikasi juga menjadi salah satu Indikator Daerah yang saat ini terus dilaksanakan. Indikator Rasio Elektrifikasi ini dari target akhir pada Renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 101,32%.
- 4) Target/ Indikator Nasional terhadap Konsumsi Listrik Perkapita yang menjadi salah satu Indikator Listrik Perkapita pada Daerah juga telah tercapai;



2.4. Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan ESDM dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra ESDM serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output ESDM tahun 2022. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

**Tabel 2.5 (Tabel T-C. 31) REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NAMA SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pilihan					Urusan Pilihan					
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				14.427.214.293	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.427.214.293	
	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000	
	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	4 Dokumen	597.207.240		Prov. Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	4 Dokumen	597.207.240	
	Prov. Kepri	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 Bulan	66.895.000		Prov. Kepri	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 Bulan	66.895.000	
	Prov. Kepri	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	95 Orang	200.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	95 Orang	200.000.000	
	Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12.563.112.053		Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12.563.112.053	
	Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	900.000.000		Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	900.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				504.742.000					504.742.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	104.742.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	104.742.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	300.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.544.600.005	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.544.600.005	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.889.714.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.889.714.765	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	12 Bulan	462.420.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	12 Bulan	462.420.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Dokumen	187.965.240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Dokumen	187.965.240	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				366.895.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				366.895.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kepri	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86 Stel	66.895.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kepri	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86 Stel	66.895.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	95 Orang	200.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	95 Orang	200.000.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 Orang	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.320.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.320.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	300.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	20.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	12 Bulan	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	12 Bulan	250.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	250.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	250.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Rapat	1.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Rapat	1.500.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102.105.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102.105.000	
Pengadaan Meubel	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	12 Bulan	102.105.000	Pengadaan Meubel	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	12 Bulan	102.105.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.688.872.288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.688.872.288	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.648.872.288	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.648.872.288	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	150.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	150.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	200.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	400.000.000	
Program Pengelolaan Aspek Geologi				2.450.000.000	Program Pengelolaan Aspek Geologi				2.450.000.000	
	Prov. Kepri	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	2 Kab/Kota	1.650.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	2 Kab/Kota	1.650.000.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

	Prov. Kepri	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	20%	800.000.000		Prov. Kepri	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	20%	800.000.000	
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1.650.000.000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1.650.000.000	
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Naskah Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen	750.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Naskah Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen	750.000.000	
		Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	600.000.000			Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	600.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Terselenggaranya sosialisasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	2 Kegiatan	300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Terselenggaranya sosialisasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	2 Kegiatan	300.000.000	
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				800.000.000	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				800.000.000	
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Kepri	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	1 Dokumen	300.000.000	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Kepri	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	1 Dokumen	300.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Prov. Kepri	Tertib pemanfaatan air tanah	7 Kab/Kota	500.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Prov. Kepri	Tertib pemanfaatan air tanah	7 Kab/Kota	500.000.000	
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Prov. Kepri	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	28,57%	1.000.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Prov. Kepri	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	28,57%	1.000.000.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1.000.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1.000.000.000	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Kepri	Data Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	500.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Kepri	Data Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	500.000.000	
		Data Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Ijin Pertambangan Rakyat dan SIPB	1 Dokumen	500.000.000			Data Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Ijin Pertambangan Rakyat dan SIPB	1 Dokumen	500.000.000	
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Prov. Kepri	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	13%	61.870.000.000	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Prov. Kepri	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	13%	61.870.000.000	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				61.870.000.000	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				61.870.000.000	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi	Prov. Kepri	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	400.000.000	Dukungan Pengadaan dan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Terlaksananya Kegiatan DAK PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	400.000.000	
Pengembangan Sumber Daya Manusia dala Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Peningkatan Jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	20 Orang	150.000.000	Inventarisasi Pemanfaatan Energi	Prov. Kepri	Data Kebutuhan Pemanfaatan Energi Provinsi Kepulauan Riau	20 Orang	150.000.000	
Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk teknologi yang menerapkan konservasi energi	Prov. Kepri	Jumlah peserta sosialisasi dalam penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	20 Perusahaan	200.000.000	Bimbingan Konservasi Energi	Prov. Kepri	Jumlah Pengguna Energi yang Tersosialisasi	20 Perusahaan	200.000.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Prov. Kepri	Terlaksananya pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	227 kWP	55.120.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	227 kWP	55.120.000.000	
	Prov. Kepri	Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	96 kWP	5.000.000.000	Pengadaan dan Pembangunan Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Terbangunnya Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	96 kWP	5.000.000.000	
	Prov. Kepri	Tersedianya FS/DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	500.000.000	Dukungan DAK Bidang Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan DAK Bidang Energi	1 Dokumen	500.000.000	
Bimbingan teknis konservasi energi kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	50 Orang	200.000.000	Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi	Prov. Kepri	Meningkatnya Pemahaman tentang Konservasi Energi	50 Orang	200.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	300.000.000	
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				34.846.682.400	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				34.846.682.400	
	Prov. Kepri	Rasio Elektrifikasi	95,50%	31.324.000.000		Prov. Kepri	Rasio Elektrifikasi	95,50%	31.324.000.000	
	Prov. Kepri	Rasio Desa Berlistrik	98,00%	700.000.000		Prov. Kepri	Rasio Desa Berlistrik	98,00%	700.000.000	
	Prov. Kepri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	2.822.682.400		Prov. Kepri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	2.822.682.400	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				600.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				600.000.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Rekomendasi	250.000.000	Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	20 Unit	250.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	350.000.000	Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Tersedianya Rasio Desa Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau	1 Tahun	350.000.000	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				575.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				575.000.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	40 Rekomendasi	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	40 Rekomendasi	250.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	325.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	325.000.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				575.000.000	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				575.000.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informasi dari Pemegang Izin	1 Rekomendasi	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informasi dari Pemegang Izin	1 Rekomendasi	250.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang mendapat Penetapan Tarif Tenaga Listrik dari Gubernur Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	250.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang mendapat Penetapan Tarif Tenaga Listrik dari Gubernur Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	250.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	
Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				622.682.400	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				622.682.400	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	1 Laporan	119.850.900	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	1 Laporan	119.850.900	
Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	3 Pelaku Usaha	152.831.500	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	3 Pelaku Usaha	152.831.500	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	350.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	350.000.000	
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				450.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				450.000.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	20 Jumlah Rekomendasi	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	20 Jumlah Rekomendasi	250.000.000	



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	200.000.000	
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				32.024.000.000	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				32.024.000.000	
Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Kepri	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	2795 Rumah	7.426.000.000	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Kepri	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	2795 Rumah	7.426.000.000	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	7 Kab/Kota	200.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	7 Kab/Kota	200.000.000	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	7.000.000.000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	7.000.000.000	
	Prov. Kepri	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	1874 Unit	16.898.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	1874 Unit	16.898.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	10 Unit	500.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	10 Unit	500.000.000	
				114.593.896.693					114.593.896.693	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang di tahun 2021, Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Hal ini merupakan suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Namun, pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, tidak terdapat adanya usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan pada tahun 2022.



BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok Kebijakan Energi Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi, arah kebijakan energi minyak dan batubara, energi terbarukan dan energi terbarukan surya. Sedangkan Pokok-pokok Kebijakan Energi Nasional yang sesuai dengan tupoksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :

1. Arah Kebijakan Energi Minyak dan Gas Bumi
 - a. Perlu peningkatan kualitas informasi untuk wilayah kerja yang ditawarkan melalui perbaikan ketersediaan data antara lain data geofisika dan geologi.
 - b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan ESDM di samping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan – permasalahan fiskal, perizinan, tanah, tumpang tindih lahan, lingkungan, permasalahan desentralisasi dan lain-lain.
2. Arah Kebijakan Batubara
 - a. Mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan melakukan pembatasan ekspor.
 - b. Mengembangkan infrastruktur, transportasi, stockpiling dan blending.
 - c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pertambangan batubara antara lain memasukkan biaya lingkungan, *good mining practice*, pembatasan *open surface mining*, mengutamakan tambang



dalam, prioritas tata ruang, konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih.

d. Melakukan regionalisasi batubara termasuk *mine mouth power plant*.

3. Arah Kebijakan Energi Terbarukan

a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada, energi biomass,surya (solar)

b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.

Untuk itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan Penegakan Hukum dibidang lingkungan hidup.
- Melaksanakan Pengelolaan SDA seefisien mungkin dan memelihara daya dukungnya dengan konservasi agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melaksanakan Penetapan, pelaksanaan dan pengawasan aturan bagi para industri tambang dalam melakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi kawasan.
- Menyusun Perencanaan pembangunan sektor kelistrikan dan membangun power plant dan gardu – gardu listrik yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pengembangan industri dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan pasokan daya listrik.
- Melaksanakan program –program jangka pendek guna mengatasi kemendesakan kebutuhan sekaligus sebagai pelengkap program – program jangka panjang.



- Meningkatkan ketersediaan sumber daya listrik agar dapat mencukupi kebutuhan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai dan rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Perencanaan Strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Indikator Kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klarifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (**input**), keluaran (**output**), hasil (**outcomes**), manfaat (**benefits**) dan dampak (**impacts**). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, untuk indikator hasil, manfaat dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahapan perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat merupakan kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Selanjutnya dapat dilihat sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1 :



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2022
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
1.	Meningkatnya Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Geologi	Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah sesuai Aturan	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	20	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	20
		Pengembangan Sistem Informasi Geologi	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Kab/Kota	2		Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	2
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	28,57	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	28,57
			Pelayanan Usaha Pertambangan Mineral	%	-		Pelayanan Usaha Pertambangan Mineral	-
			Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral sesuai dengan Kaidah Good Mining Practice	%	-		Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral sesuai dengan Kaidah Good Mining Practice	-
		Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan daerah sektor pertambangan mineral	%	-		Penerimaan daerah sektor pertambangan mineral	-



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
3	Meningkatnya Pengembangan dan Penyediaan Ketenagalistrikan serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	13	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	13
			Rasio Elektrifikasi	%	95.50	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	95.50
			Rasio Desas Berlistrik	%	98.00		Rasio Desas Berlistrik	98.00
4	Meningkatnya Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penetapan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Rencana Kerja DESDM tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016-2021. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan :

- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
- Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;

Program kegiatan diatas merupakan program yang terkait dengan urusan Energi dan Sumber daya Mineral dan merupakan program kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat dan 1 program kegiatan yang bersifat rutin dan menunjang program dan kegiatan yang menjadi urusan pilihan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka menunjang program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2022 dengan pagu **Rp. 114.593.896.693,-**



(Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

4.2 Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2022 mengacu sepenuhnya pada program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rincian cara mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan dilihat pada **tabel 4.1**. berikut :



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(3.a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pilihan									
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
I	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian					2.450.000.000				2.350.000.000
		Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Kab/Kota	Prov. Kepri	2	1.650.000.000	APBD		1	1.550.000.000
		Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai engan Aturan	%	Prov. Kepri	20	800.000.000	APBD		20	800.000.000
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	Prov. Kepri	10	1.650.000.000	APBD		8	1.550.000.000
	1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Naskah Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	Prov. Kepri	7	750.000.000	APBD		3	500.000.000
		Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	Prov. Kepri	1	600.000.000	APBD		3	750.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

		2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terselenggaranya sosialisasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Kegiatan	Prov. Kepri	2	300.000.000	APBD		2	300.000.000
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	800.000.000	APBD		100	800.000.000
		1	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	Dokumen	Prov. Kepri	1	300.000.000	APBD		1	300.000.000
		2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tertib pemanfaatan air tanah	Kab/Kota	Prov. Kepri	7	500.000.000	APBD		7	500.000.000
		II	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara					1.000.000.000				1.000.000.000
				Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	Prov. Kepri	28,57	1.000.000.000	APBD		28,57	1.000.000.000
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketersediaan potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	Prov. Kepri	28,57%	1.000.000.000	APBD		28,57%	1.000.000.000
		1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Data Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen	Prov. Kepri	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

				Data Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Ijin Pertambangan Rakyat dan SIPB	Dokumen	Prov. Kepri	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
			III	Program Pengelolaan Energi Terbarukan				61.870.000.000				15.750.000.000
				Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Prov. Kepri	13	61.870.000.000	APBD		14	15.750.000.000
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Cakupan pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi	%	Prov. Kepri	3	61.870.000.000	APBD	3	15.750.000.000
			1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	Prov. Kepri	1	400.000.000	APBD	1	400.000.000
			2	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Orang	Prov. Kepri	20	150.000.000	APBD	20	150.000.000
			3	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk teknologi yang menerapkan konservasi energi	Jumlah peserta sosialisasi dalam penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	Perusahaan	Prov. Kepri	20	200.000.000	APBD	20	200.000.000
			4	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Terlaksananya pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	kWP	Prov. Kepri	227	55.120.000.000	APBD	44	9.000.000.000
					Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	kWP	Prov. Kepri	96	5.000.000.000	APBD	96	5.000.000.000



RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

				Tersedianya FS/DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	Prov. Kepri	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000	
			5	Bimbingan teknis konservasi energi kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	Orang	Prov. Kepri	50	200.000.000	APBD		50	200.000.000
			6	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	Prov. Kepri	1	300.000.000	APBD		2	300.000.000
			IV	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan									16.622.682.400
				Rasio Elektrifikasi	%	Prov. Kepri	95,50	31.324.000.000	APBD		96,00		12.800.000.000
				Rasio Desa Berlistrik	%	Prov. Kepri	98,00	700.000.000	APBD		99,00		700.000.000
				Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	2.822.682.400	APBD		100		3.122.682.400
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	50	600.000.000	APBD		50	650.000.000



RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

			1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rekomendasi	Prov. Kepri	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	350.000.000	APBD		100	400.000.000
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan	%	Prov. Kepri	75	575.000.000	APBD		75	650.000.000
			1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomendasi	Prov. Kepri	40	250.000.000	APBD		40	250.000.000
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	325.000.000	APBD		100	400.000.000



RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

				Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen	Prov. Kepri	1	575.000.000	APBD	1	675.000.000
		1		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informasi dari Pemegang Izin	Rekomendasi	Prov. Kepri	1	250.000.000	APBD	1	250.000.000
		2		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Persentase Jumlah Badan Usaha yang mendapat Penetapan Tarif Tenaga Listrik dari Gubernur Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	250.000.000	APBD	100	300.000.000
		3		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	75.000.000	APBD	100	125.000.000
				Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	%	Prov. Kepri	30	622.682.400	APBD	30	647.682.400



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

		1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Laporan	Prov. Kepri	1	119.850.900	APBD		1	119.850.900
		2	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	Pelaku Usaha	Prov. Kepri	3	152.831.500	APBD		3	152.831.500
		3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	350.000.000	APBD		100	375.000.000
			Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri yang diterbitkan	%	Prov. Kepri	100	450.000.000	APBD		100	500.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

		1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	Jumlah Rekomendasi	Prov. Kepri	20	250.000.000	APBD		20	250.000.000
		2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	200.000.000	APBD		100	250.000.000
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	%	Prov. Kepri	66	32.024.000.000	APBD		69	13.500.000.000
		1	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Rumah	Prov. Kepri	2795	7.426.000.000	APBD		1000	3.000.000.000
		2	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Kab/Kota	Prov. Kepri	7	200.000.000	APBD		7	200.000.000
		3	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	Unit	Prov. Kepri	10	7.000.000.000	APBD		8	6.000.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

				Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	Unit	Prov. Kepri	1874	16.898.000.000	APBD		300	3.800.000.000
		4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	Unit	Prov. Kepri	10	500.000.000	APBD		10	500.000.000
		V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					14.427.214.293				14.427.214.293
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	Prov. Kepri	2	100.000.000	APBD		2	100.000.000
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	Dokumen	Prov. Kepri	4	597.207.240	APBD		4	597.207.240
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bulan	Prov. Kepri	12	66.895.000	APBD		12	66.895.000
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Orang	Prov. Kepri	95	200.000.000	APBD		95	200.000.000
				Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	Prov. Kepri	12	12.563.112.053	APBD		12	12.563.112.053
				Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	Prov. Kepri	12	900.000.000	APBD		12	900.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	Prov. Kepri	100	504.742.000	APBD		100	504.742.000
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	Prov. Kepri	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Prov. Kepri	1	104.742.000	APBD		1	104.742.000	
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Prov. Kepri	1	300.000.000	APBD		1	300.000.000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	Prov. Kepri	100	8.544.600.005	APBD		100	8.544.600.005
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Prov. Kepri	14	7.889.714.765	APBD		14	7.889.714.765	
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Bulan	Prov. Kepri	12	462.420.000	APBD		12	462.420.000	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	Prov. Kepri	1	4.500.000	APBD		1	4.500.000	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen	Prov. Kepri	1	187.965.240	APBD		1	187.965.240	



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	Prov. Kepri	100	366.895.000	APBD		100	366.895.000
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	Prov. Kepri	86	66.895.000	APBD			86	66.895.000
		2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	Orang	Prov. Kepri	95	200.000.000	APBD			95	200.000.000
		3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	Prov. Kepri	48	100.000.000	APBD			48	100.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Prov. Kepri	100	2.320.000.000	APBD		100	2.320.000.000
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	Prov. Kepri	12	300.000.000	APBD			12	300.000.000
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	Prov. Kepri	12	20.000.000	APBD			12	20.000.000
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Bulan	Prov. Kepri	12	250.000.000	APBD			12	250.000.000
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	Prov. Kepri	12	250.000.000	APBD			12	250.000.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	Prov. Kepri	240	1.500.000.000	APBD		240	1.500.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	Prov. Kepri	100	102.105.000	APBD		100	102.105.000
			1	Pengadaan Meubel	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	Bulan	Prov. Kepri	12	102.105.000	APBD		12	102.105.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Prov. Kepri	100	1.688.872.288	APBD		100	1.688.872.288
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Prov. Kepri	12	40.000.000	APBD		12	40.000.000
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	Prov. Kepri	12	1.648.872.288	APBD		12	1.648.872.288
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	Prov. Kepri	100	900.000.000	APBD		100	900.000.000
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	Prov. Kepri	12	150.000.000	APBD		12	150.000.000



RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	Prov. Kepri	12	150.000.000	APBD		12	150.000.000
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	Prov. Kepri	12	200.000.000	APBD		12	200.000.000
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	Prov. Kepri	12	400.000.000	APBD		12	400.000.000
									114.593.896.693				50.149.896.693



RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

Dari rencana program dan kegiatan di tahun 2021 Prakiraan Maju Tahun 2022, terdapat program dan kegiatan yang menjadi program yang menjadi sasaran Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Tabel SDGs.

Dari Program SDGs terdapat satu program yang belum tercapai untuk di Provinsi Kepulauan Riau dan harus menjadi salah satu Program Prioritas yaitu Program Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN untuk data terkait persentase tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerja sama dengan dinas/badan terkait.

Program yang harus dicapai dapat dilihat pada tabel SDGs dibawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

Kode Indikator	Target/indikator	Indikator Daerah	Sumber data	Satuan	Evaluasi		Status	OPD
					2020 (Target)	2020 (Realisasi)		
<p>Target 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.</p>								
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	DESDM	%	50	55		ESDM
<p>6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air</p>								



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2021

6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Laporan KemenESDM	Kegiatan	1	1		ESDM
Target 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern								
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	DESDM	%	92,50	93,72		ESDM
7.1.1. (a)	Konsumsi listrik per kapita	Listrik perkapita	BPS	Kwh/Kapita	581,2	581,2		ESDM
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global								
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	DESDM	%	11%	11%		ESDM



BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Organisasi Perangkat Daerah ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah berusaha melaksanakan kegiatan dan program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022 Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam OPD ini, bahwa prestasi yang akan dicapai tak lepas dari komitmen yang kuat dari Pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk menfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan Rencana Kerja 2022 akan datang. Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditunjukkan dengan tercapainya kondisi berikut :

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Kesadaran perusahaan terhadap kewajibannya melakukan pelaporan dalam Kegiatan Pertambangan ;
3. Pelayanan Prima bagi dunia usaha atau Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau ini akan disusun setiap tahunnya berdasarkan atas penjabaran dari Renstra. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat termasuk pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renja ini dengan sebaik-baiknya;
2. Memperhitungkan kemampuan Dinas ESDM dalam rangka menyediakan pendanaan, sarana-prasarana, dan sumberdaya aparatur yang diperlukan untuk mengoperasionalkan rencana strategis;



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

3. Renstra Tahun 2016-2021 dan Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di tahun-tahun mendatang akan diusahakan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Adapun upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

- Tersedianya dana Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- Tersedianya data base yang lengkap untuk menunjang kegiatan Pertambangan dan Energi;
- Tersedianya Anggaran yang menunjang bagi kebutuhan akan sumber Energi baik Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
- Tersedianya kualitas SDM yang memiliki keilmuan Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait bidang urusannya.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Operasional di Lapangan yang bersifat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).



**RENCANA KERJA(RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

Demikian Rencana Kerja tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dibuat untuk dapat dijadikan acuan terhadap Program Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Tanjungpinang, Juni 2021

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19771116 199612 1 001